

## BAB 2

### Sejarah Awal Kamboja

Untuk menjelaskan invasi Vietnam atas Kamboja pada akhir tahun 1978, bab ini akan diuraikan secara kronologis dalam lima subbab. Lima Subbab tersebut: Letak geografis dan komposisi penduduk Kamboja; Sejarah Kerajaan Kamboja; Keadaan Kamboja merdeka (1953—1970); Kamboja di bawah pemerintahan Khmer Merah (1975—1979); dan Invasi Vietnam atas Kamboja. Dengan pembagian subbab ini, diharapkan dapat melihat benang merah keadaan Kamboja yang akhirnya membuat Vietnam melakukan invasi terhadap Kamboja.

#### 2.1 Letak Geografis dan Komposisi Penduduk Kamboja

Kamboja adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di selatan Indocina yang berbatasan langsung dengan Thailand sebelah barat dan utara, Laos di sebelah utara, dan Vietnam di sebelah tenggara dan timur.<sup>35</sup> Selain itu, di sepanjang bagian selatan dan barat daya, Kamboja berbatasan dengan Teluk Thailand.<sup>36</sup> Negara ini mempunyai luas wilayah 182.000 km persegi dan mempunyai dua bentuk bagian geografis yang berlainan.<sup>37</sup> Bagian pertama adalah dataran rendah, yaitu Delta Mekong dan Tonle Sap, danau besar, yang merupakan urat nadi Kamboja.

Tanahnya yang subur sangat menguntungkan dalam proses pertanian sehingga cocok untuk masyarakat Kamboja yang masih bercorak agraris. Selain itu, daerah ini juga merupakan kawasan yang paling kaya dan ramai aktivitas penduduknya. Hal ini disebabkan letaknya yang sangat strategis sehingga menjadikan Delta Mekong mempunyai kunci penting dalam perkembangan ekonomi Kamboja. Bagian kedua adalah kawasan pegunungan yang terletak di barat daya, utara, dan timur laut Kamboja. Kawasan pegunungan ini sebagian besar diliputi oleh hutan rimba dan bukit-bukit pegunungan yang seolah-olah

<sup>35</sup> Michael Vickery. *Kampuchea: Politics, Economics, and Society*. Sidney: Allen & Unwin.1986. hlm1.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Philippe Devillers. *Sejarah Indo-China Modern*. (terj. Ruhana Harun). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. 1998. hlm 3.

mengelilingi dataran rendah Kamboja—tempat sebagian besar masyarakat Kamboja tinggal.

Masyarakat Kamboja sendiri terbagi dalam beberapa jenis etnis yang berbeda. Mayoritas masyarakat Kamboja atau sekitar 90% masyarakat dari keseluruhan penduduk Kamboja adalah masyarakat dengan etnis Khmer, penduduk asli Kamboja. Sisanya atau sebagian kecil dari populasi penduduk Kamboja adalah masyarakat yang beretnis Vietnamese, Chinese, Cham-Malays, Burmese, Laotians, Japanese, Thai, Filipinos, Eropa, dan komunitas suku *seminomadic* atau lebih dikenal dengan Khmer Loeu yang biasanya mendiami daerah-daerah perbukitan Kamboja.<sup>38</sup>

Tidak diketahui secara pasti oleh para arkeolog dunia mengenai asal muasal etnis Khmer kuno. Para arkeolog hanya menjelaskan bahwa Indocina semenjak zaman neolithikum telah didiami oleh tiga jenis ras, yaitu Negrito, Proto-Melanesian, dan Indonesian (Proto-Malays).<sup>39</sup> Diperkirakan Suku Khmer ini datang ke Asia Tenggara 2000 tahun sebelum masehi.<sup>40</sup> Mereka datang ke Asia Tenggara kemungkinan besar dari selatan Cina.<sup>41</sup> Kedatangan suku Khmer ini telah menyingkirkan suku Chams dari daerah Delta Mekong. Pada abad 8M, kejayaan Khmer telah menguasai Kamboja karena kekuasaan kerajaan Funan telah hancur.<sup>42</sup> Kemudian sejak saat itu, Kamboja dikuasai oleh etnis Khmer. Kini sebagian besar masyarakat Khmer tinggal di sekeliling Delta Mekong. Mayoritas dari etnis Khmer bermata pencaharian dalam bidang agraris, khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan.

Selain etnis Khmer yang mendiami Kamboja, ternyata orang Vietnam juga mendapatkan tempat di Kamboja. Awal dari orang-orang Vietnam bermigrasi ke Kamboja bermula ketika pada akhir abad 17M, kerajaan Vietnam menguasai

<sup>38</sup> Thomas Fitzsimmons (ed.). *Cambodia: Its People, Its Society, its Culture*. Washington: Hraf Press. 1959. hlm 33.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 37.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Peter A. Poole. *Cambodia's Quest For Survival American—Asian*. Educational Exchange, Inc. 1969. hlm 8.

<sup>42</sup> Bangsa Mon pada abad 15 sebelum masehi datang ke Kamboja dan akhirnya mendiami kawasan rendah Lembah Mekong. Pada perkembangan selanjutnya, Bangsa Mon ini mendirikan kerajaan besar yang menguasai daerah Mekong dengan nama Kerajaan Funan. Pada abad ke-5 M, Funan menghadapi pemberontakan besar dari orang-orang Khmer. Akhirnya, pada abad ke-8 M, kekuasaan Kerajaan Funan terpecah belah dan hancur. Semenjak saat itulah, Bangsa Khmer yang menguasai Kamboja. Untuk lebih jelasnya lihat Devillers, *Op.Cit.*, hlm 5-8.

Kamboja sebagai negara naungannya.<sup>43</sup> Sejak saat itu, banyak orang Vietnam datang ke Kamboja dan mengeksploitasi tanah Kamboja. Dalam perkembangannya, orang-orang Vietnam ini menguasai daerah subur pertanian Kamboja dari Phnom Penh hingga Stung Treng dan dari Battambang hingga Chaudoc.<sup>44</sup> Kemudian, ketika Kamboja dikuasai oleh pemerintah kolonial Perancis, pihak Perancis juga melegalkan etnis Vietnam untuk melakukan aktivitas sosial-ekonominya di Kamboja. Kebijakan ini dilakukan oleh Perancis untuk memenuhi kuota petugas sipil kolonial dan buruh perkebunan karet di Kamboja.<sup>45</sup> Maka tidak mengherankan, apabila etnis ini adalah etnis kedua terbesar di Kamboja setelah Khmer.

Pada umumnya masyarakat Kamboja merasa antipati terhadap orang Vietnam. Permusuhan tradisional ini terjadi karena Vietnam telah banyak mengambil wilayah teritorial Kamboja pada saat ekspansi kerajaan Vietnam dulu. Selain itu, orang-orang Vietnam yang tinggal di pedesaan Kamboja juga tidak berupaya untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat Kamboja. Hal ini dibuktikan dengan adanya ungkapan bahwa ketika orang Vietnam masuk, orang Khmer harus keluar dari daerah tersebut.<sup>46</sup>

Peran orang Vietnam dalam bidang sosial-ekonomi dan politik pada masa kekuasaan Perancis ternyata juga menciptakan friksi antara masyarakat Kamboja dan Vietnam. Konflik ini terjadi karena orang-orang Vietnam ini yang diberi kuasa oleh Perancis untuk melaksanakan kegiatan politik kolonial sebagai petugas sipil dan pelaksana kegiatan ekonomi di Kamboja. Sehingga seolah-olah etnis Vietnam adalah golongan penguasa kedua di Kamboja setelah Perancis.

Hal ini lah yang membuat tidak terjadinya asimilasi budaya antara etnis Vietnam dan Etnis Khmer di Kamboja. Kini umumnya orang Vietnam tinggal di daerah Urban seperti Phnom Penh atau daerah Delta Mekong, Sungai Basak, Prey Veng, Kandal, Kompong Cham, dan Tonle Sap.<sup>47</sup> Kebanyakan dari mereka

---

<sup>43</sup> Thomas Fitzsimmons, *Op.Cit.*, hlm 40.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 40

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ross Russel R (ed.) *Cambodia a Country Study*. Washington: Federal Result Library Division of Congress. 1990. hlm 108-110.

bermata pencaharian dalam bidang pertanian ataupun menjadi pengusaha dalam bidang ekonomi.

Etnis yang sangat berpengaruh di Kamboja, khususnya dalam bidang ekonomi adalah etnis China. Sebagian besar penduduk China yang datang ke Kamboja bergerak dalam bidang perdagangan. Mereka umumnya tinggal di Phnom Penh, Oudong, Kampot, Battambang, dan Kompong Chhnang.<sup>48</sup> Gelombang migrasi dari China ke Kamboja umumnya berasal dari daerah selatan China seperti Propinsi Kwangtung, Fukien, dan Hainan.<sup>49</sup> Umumnya hubungan antara masyarakat Khmer dengan orang China berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak sekali terjadi perkawinan antaretnis Khmer dan orang China.

Etnis Cham juga merupakan suku pendatang di Kamboja. Walaupun berdasarkan sejarahnya, masyarakat Cham dengan orang Khmer telah lama hidup berdampingan sejak abad 15M. Menurut keterangan, kedatangan etnis Cham merupakan usaha pelarian orang-orang Kerajaan Champa pada abad 15M dari Vietnam ke Kamboja.<sup>50</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Cham ini memeluk agama Islam, sebagai hasil dari kontak mereka dengan masyarakat *Malays*. Masyarakat Cham ini di invasi oleh *Malays* yang memasuki Kamboja melalui Kompot dan daerah sekitarnya.<sup>51</sup> Hubungan yang terjalin antara masyarakat Cham dengan *Malays*, akhirnya membentuk komunitas Cham-*Malays*.

Mereka umumnya kini tinggal di sekitar kawasan Delta Mekong dan Tonle Sap atau di Propinsi Battambang, Pouthist, Takev, Kampot, Kampong Cham, Kampong Thum, dan Propinsi Chhnang.<sup>52</sup> Walaupun Cham-*Malays* telah lama hidup berdampingan dengan etnis Khmer. Namun, perkawinan etnis antara etnis Cham-*Malays* dengan Khmer jarang ditemukan. Hal ini disebabkan perbedaan agama antara kedua masyarakat ini.

Komunitas lainnya yang berada di Kamboja adalah komunitas suku *Seminomadic* yang umumnya berdomisili di pegunungan dan perbukitan

<sup>48</sup> Thomas Fitzsimmons, *Op.Cit.*, hlm 40.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Kerajaan Champa dahulu merupakan salah satu kerajaan yang berkuasa di daerah Cao Ha di utara dan Bien Hoa di selatan Vietnam. Namun pada 1471, Champa ditaklukan oleh Vietnam dan banyak dari mereka lari ke Kamboja karena tidak mau dijadikan budak di bawah kekuasaan Vietnam. Diperkirakan masyarakat Cham mulai tinggal di Kamboja pada tahun 1456. Lihat Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 99.

<sup>51</sup> Thomas Fitzsimmons, *Op.Cit.*, hlm 45.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Kamboja. Suku-suku ini bukanlah etnis Khmer. Asal usul etnis ini pun tidak jelas berasal darimana, namun mereka dipercaya sebagai keturunan orang Mon-Khmer.<sup>53</sup> Komunitas Khmer Loeu ini adalah suku Kuy, Mnong, Stieng, Brao, Pear, Jarai, dan Rade.<sup>54</sup> Mereka umumnya dapat ditemukan di Propinsi Stoeng Treng, Kratie, Mondolkiri dan bagian timur laut Propinsi Rotanokiri.<sup>55</sup> Pemerintah Kamboja menyebut komunitas suku ini sebagai orang-orang Bukit Khmer.

## 2.2 Sejarah Kerajaan Kamboja

Sejak abad ke-15, Kerajaan Khmer telah kehilangan kemerdekaan dan menjadi negara naungan Siam (Ayuthia).<sup>56</sup> Kemudian pada permulaan abad ke-17, pengaruh Vietnam di Kamboja mulai mengurangi dominasi Siam di Kamboja. Hal ini disebabkan raja Kamboja, Chey Chetta II (1618—1625) meminta bantuan kepada Vietnam untuk melepaskan Kamboja dari cengkraman Siam. Permintaan ini pun ditanggapi oleh Vietnam pada tahun 1658 dengan meminta imbalan bahwa orang-orang Vietnam dapat tinggal dan memiliki tanah di Kamboja serta memiliki hak yang sama dengan orang Khmer.<sup>57</sup> Dengan adanya hal ini maka Kamboja pun lepas dari cengkraman Siam, tetapi masuk ke dalam cengkraman Vietnam. Kamboja pun diharuskan memberikan upeti tahunan kepada Vietnam sebagai tanda kesetiaan Kamboja ke Vietnam. Dengan berkuasanya Vietnam di Kamboja,

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 101.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 104.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 101 dan Thomas Fitzsimmons, *Op.Cit.*, hlm 52-53.

<sup>56</sup> Pada abad ke 8 M kekuasaan Funan hancur dan kejayaan Khmer mulai menguasai Kamboja. Pada abad 11 dan 12, kekuasaan Khmer di kamboja mulai mengalami kekacauan dalam negeri yang disebabkan perpecahan di dalam keluarga kerajaan yang saling memperebutkan takhta kerajaan. Perebutan takhta kerajaan ini telah menimbulkan ikut campurnya kekuasaan asing dalam pemerintahan Kamboja. Hal ini disebabkan banyak putera-putera kerajaan yang terkadang meminta bantuan Siam ataupun Vietnam untuk membantu mereka menjadi raja. Oleh karena itu, sejak abad ke-15 Kamboja menjadi negara naungan Siam dan membuat Kamboja harus menghantarkan upeti kepada Siam setiap tahun sebagai tanda bakti setia. Selain itu, orang yang menjadi penguasa atau raja di Kamboja harus disetujui dan disahkan terlebih dahulu oleh pihak Siam. Untuk lebih jelasnya lihat Devillers, *Op.Cit.*, hlm 8-19. Perlu diingat bahwa politik kerajaan-kerajaan Asia Tenggara era tradisional dari abad 13—16 berdasarkan pada konsep mandala dan cakravartin. Dengan adanya konsep ini, setiap kerajaan di Asia Tenggara selalu berusaha untuk menguasai kerajaan lain. Hal ini dilakukan supaya kerajaan tersebut mempunyai banyak negara naungan dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat mandala dan rajanya bergelar raja cakravartin, raja dari segala raja. Dengan adanya politik tradisional ini, maka dapat dipahami apabila Siam dan Vietnam selalu memperebutkan Kamboja sebagai negara naungannya. Untuk lebih jelasnya lihat O.W Wolters. *History, Culture, and Region In Southeast Asia Perspectives*. Pasir Panjang: ISEAS. 1999.

<sup>57</sup> Devillers, *Op.Cit.*, hlm 14.

Vietnam pun mulai mengekspansi wilayah-wilayah Kamboja untuk dijadikan wilayah Vietnam.<sup>58</sup>

Namun pada tahun 1773, Kamboja kembali menjadi negara naungan Siam setelah Siam berhasil mengangkat Ang Non yang mempunyai sikap permusuhan terhadap Vietnam, sebagai Raja Kamboja.<sup>59</sup> Ang Non pun berusaha mengambil alih wilayah Cochin China yang telah diambil oleh Vietnam. Namun, usaha ini gagal dan membuatnya mati dibunuh pada tahun 1799.<sup>60</sup> Kemudian dari tahun 1813—1845, kekuasaan atas Kamboja Kembali ke tangan Vietnam. Semenjak tahun 1845, wilayah Kamboja seolah-olah terbagi dua wilayah kekuasaan. Hal ini disebabkan Siam tidak mau melepaskan kesempatan untuk mendapatkan Kamboja kembali ke dalam pengaruhnya.<sup>61</sup> Satu bagian milik kekuasaan Bangkok dan satu bagian lagi milik kekuasaan Vietnam. Pembagian kekuasaan ini dibuktikan dengan pengangkatan Ang Duong sebagai Raja Kamboja dengan persetujuan kerajaan Bangkok dan Vietnam.<sup>62</sup> Setelah raja ini meninggal pada tahun 1860, ia pun digantikan oleh anaknya yang bernama Ang Voddey dengan gelar Raja Norodom. Namun, pada Agustus 1861 saudara Norodom, Si Votha, melakukan pemberontakan terhadap Norodom.<sup>63</sup> Norodom yang panik akhirnya pergi ke Bangkok pada Januari 1862 untuk mencari dukungan demi mengambil kembali takhta Kamboja.

Sementara itu, pada Juni 1862, Vietnam telah berhasil ditaklukan oleh Perancis. Oleh karena itu, Vietnam diharuskan untuk menyerahkan wilayah Saigon, Bein Hoa, Mytho, Vinh Long, serta Ulin Condore kepada Perancis.<sup>64</sup> Untuk meluaskan kekuasaan Perancis di Indocina dan menghambat pengaruh Inggris di Thailand dan Burma meluas ke wilayah lain serta perlombaan

<sup>58</sup> Pada tahun 1701, Vietnam mengambil wilayah Giodinh, Bein Hoa, dan Baria. Pada tahun 1757, Vietnam pun mengambil wilayah Sadec, Chaudoc, dan Travinh. Dengan diambilnya kawasan-kawasan ini dari Kamboja, maka secara berangsur-angsur daerah Delta Mekong jatuh ke tangan Vietnam. Daerah Delat Mekong ini penting karena daerah ini sangat subur dan cocok untuk pertanian. Selain itu, Delta Mekong juga merupakan daerah yang strategis untuk perdagangan. Oleh karena itu, Vietnam berupaya mengambil daerah-daerah Kamboja di sekitar Delta Mekong untuk kepentingannya. *Ibid.*, hlm 15.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 16.

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 17-18.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 17-19

<sup>63</sup> George, Mac Turnan Kahin. *Kerajaan dan Politik Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. 1982. hlm 784.

<sup>64</sup> Devilers, *Op.Cit.*, hlm 21.

perdagangan dengan Inggris di China bagian barat, Perancis pun akhirnya melirik Kamboja untuk dijadikan daerah penghalangnya sekaligus menjadikannya tanah jajahan.<sup>65</sup>

Raja Norodom yang baru kembali dari Bangkok pada Mei 1862 pun diajak berunding dengan Perancis untuk membicarakan masa depan Kamboja.<sup>66</sup> Perancis menjanjikan perlindungan kepada Kamboja. Tujuannya agar negara ini bisa lepas dari cengkraman Siam dan Vietnam yang selalu menginginkan Kamboja menjadi negara bawahannya dan menyatukan kembali kedaulatan Kamboja yang tadinya tepecah-pecah di antara dua kekuasaan.

Dengan pertimbangan hal tersebut, akhirnya pada 11 Agustus 1863, Raja Norodom dan Perancis menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa Kamboja mulai saat itu menjadi negara protektorat, negara perlindungan, Perancis.<sup>67</sup> Sebagai imbalan dari adanya perlindungan Perancis, pihak Perancis meminta hak mereka untuk berada di Kamboja. Hal ini berarti orang-orang Perancis boleh bebas bergerak di seluruh Kamboja dan boleh diizinkan untuk bebas mengerjakan tanah serta melakukan kegiatan ekonomi di Kamboja. Selain itu, Perancis juga menginginkan supaya barang-barang produksi Perancis dapat masuk ke Kamboja dengan bebas tanpa adanya pelarangan dan cukai.<sup>68</sup>

Perjanjian antara pihak Perancis dan Raja Norodom telah disahkan atau diratifikasi oleh Napoleon III pada 17 April 1864.<sup>69</sup> Dengan adanya pengesahan ini, Kamboja pun memulai babak baru sejarahnya dengan menjadikan negaranya masuk ke dalam cengkraman kekuasaan asing. Pada 17 Juni 1884, Kamboja pun resmi menjadi negara jajahan pemerintah kolonial Perancis berdasarkan suatu konvensi bersama antara Gubernur Jendral Thomson dengan Raja Norodom.<sup>70</sup> Konvensi itu menyatakan bahwa mulai semenjak penandatangan konvensi tersebut, Perancislah yang berkuasa di Kamboja dan segala kekuasaan raja dalam memerintah ditiadakan.

---

<sup>65</sup> D.G.E. Hall. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional. 1999. hlm 799.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 795.

<sup>67</sup> Devillers, *Op.Cit.*, hlm 21.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 21-22.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 22.

<sup>70</sup> D.G.E. Hall. *Op.Cit.*, hlm 813.

Pada tahun 1887, dapat dikatakan bahwa Perancis telah resmi menjadi negara penjajah di Indocina. Struktur pemerintahan kolonial Perancis terbagi atas lima daerah administratif. Daerah-daerah tersebut adalah Vietnam Selatan (Cochin China), Vietnam Tengah (Annam), Vietnam utara (Tonkin), Kamboja, dan Laos.<sup>71</sup> Semua daerah administratif ini dibawah oleh seorang gubernur jenderal dengan markas besar di Hanoi yang diketuai oleh *The Comander Superior des Troupes*.<sup>72</sup> Ketua residen Perancislah yang mengawasi jalannya pemerintahan Kamboja.

Ketua residen diberi instruksi bahwa ia tidak boleh mencampuri urusan adat istiadat, agama, dan urusan tradisional orang Kamboja. Seorang ketua residen mempunyai beberapa residen di bawahnya yang dilantik sendiri oleh Perancis dan ditempatkan di tiap-tiap pusat wilayah seperti Pursat, Kratie, Kompot, dan Kompog Thom.<sup>73</sup> Ketua residen juga dibantu oleh majelis agung bidang ekonomi dan keuangan serta hukum. Majelis ini beranggotakan pegawai-pegawai Perancis dan sebagian elit tradisional Kamboja. Majelis ini merupakan badan penasihat saja dan hanya diizinkan untuk membicarakan masalah jika diajukan oleh gubernur jenderal. Raja juga tidak berkuasa untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari ketua residen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketua residen Perancis memegang kekuasaan yang paling tinggi di Kamboja.

Pada Oktober 1912, Gubernur Jenderal Albert Sarraut yang diberi mandat untuk melaksanakan pemerintahan di Indocina telah mengumumkan persetujuan Perancis untuk membuat institusi-institusi yang mewakili penduduk setempat.<sup>74</sup> Sebagai realisasi dari hal itu, pada 18 Maret 1913 didirikanlah *Assemble Consultative Indigene* 'Majelis Perhimpunan Pribumi', yang anggota-angotanya dilantik oleh Perancis.<sup>75</sup> Namun, sebagian besar jabatan-jabatan tertentu dipercayakan oleh orang-orang Vietnam yang lebih cakap dibandingkan dengan orang Kamboja.<sup>76</sup> Oleh karena itu, pada masa ini, banyak orang Kamboja yang tidak menyukai orang Vietnam. Hal ini disebabkan orang Vietnam adalah golongan penguasa kedua di Kamboja setelah Perancis. Selain itu, mereka juga

<sup>71</sup> David Joel Stainberg (ed.). *In Search of Southeast Asia: Modern History*. Honolulu: University of Hawaii Press. 1987. hlm. 187.

<sup>72</sup> D.G.E.Hall, *Op.Cit.*, hlm 814.

<sup>73</sup> Devillers., *Op.Cit.* hlm 27-29.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm 37.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 37.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm 40.

menguasai sektor-sektor penting kehidupan Kamboja, seperti ekonomi dan politik. Walaupun memang ada golongan mandarin, namun jumlahnya tidak sebanding dengan orang Vietnam yang ada di Kamboja.<sup>77</sup>

Mengenai kebijakan yang diambil pemerintah kolonial secara keseluruhan di Kamboja, bisa dibilang Perancis hanya tertarik terhadap Kamboja dari segi pertahanannya. Hal ini disebabkan daerah kamboja yang berdekatan dengan Thailand dan Burma dapat digunakan sebagai penghambat pengaruh Inggris di Asia Tenggara. Kegiatan utama Perancis di Kamboja bisa dibilang hanya berkisar pada segi keamanan pertahanan. Sedangkan sektor manusia dan sumber daya alam Kamboja menjadi prioritas kedua dalam kebijakan Perancis.<sup>78</sup>

Sementara itu, pada 23 April 1941, Raja Sisowath Monivong mangkat dan digantikan oleh Pangeran Norodom Sihanouk yang naik takhta di usia 18 tahun pada 28 Oktober 1941.<sup>79</sup> Pihak Perancis lebih menyukai Sihanouk dibandingkan Putera Monireth, anak sulung dari Raja Sisowath Monivong, yang sejak tahun 1930 sudah menjabat sebagai wakil pribadi raja dalam bidang kesehatan dan kemakmuran.<sup>80</sup> Sebagai wakil pribadi raja, Perancis melihat Putera Monireth sebagai sosok yang cenderung tidak menyukai aturan dan mempunyai gagasan mengenai kemerdekaan Kamboja terlebih ketika Jepang mulai ingin menguasai Kamboja pada permulaan perang dunia kedua.<sup>81</sup>

Hal ini tentu saja dapat membahayakan kekuasaan Perancis di Kamboja. Oleh karena itu, Perancis pun lebih memilih Sihanouk menjadi Raja Kamboja. Dari segi kebangsawanan, Sihanouk mempunyai hubungan darah dari Sisowath Monivong dan Raja Norodom. Melalui ibunya, Puteri Monivong, Sihanouk adalah cicit dari Sisowath Monivong dan melalui bapanya, Putera Norodom Sutharot, Sihanouk menjadi cicit dari Raja Norodom. Dengan demikian, bagi kerajaan Kamboja naiknya Sihanouk menjadi raja bukanlah menjadi masalah karena Sihanouk pun adalah seorang cucu yang mempunyai darah raja. Perancis berharap

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 40.

<sup>78</sup> Kahin, *Op.Cit.*, 786.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm 788.

<sup>80</sup> Devillers, *Op.Cit.*, hlm 44.

<sup>81</sup> Kahin, *Op.Cit.*, hlm 788.

dengan naiknya Sihanouk yang masih muda dapat menjamin kekuasaan Perancis yang saat itu sedang mengalami ancaman Jepang di Indocina.<sup>82</sup>

Akhirnya, pada Maret 1945, pasukan Jepang dapat menguasai Kamboja dan melumpuhkan semua pasukan militer serta administratif Perancis.<sup>83</sup> Pada 10 Maret, pemimpin Jepang di Kamboja, Kubota, menghadap Pangeran Norodom Sihanouk dan meminta Sihanouk untuk mengumumkan berakhirnya penjajahan Perancis. Hal ini pun disambut baik oleh kerajaan. Sehingga pada 12 Maret 1945, Kamboja menyatakan bahwa semua perjanjian dan konvensi yang berkaitan dengan Perancis atas Kamboja telah berakhir. Sejak saat itu, Kamboja diikrarkan menjadi negara yang merdeka.<sup>84</sup>

Namun, kehadiran Jepang di Kamboja tidak berlangsung lama karena pihak Jepang mengalami kekalahan dari pihak sekutu. Dengan kekalahan Jepang, maka Perancis pun berniat kembali ke Indocina, khususnya ke Kamboja. Akan tetapi, niat Perancis tersebut tidak disambut baik oleh Kamboja. Hal ini disebabkan semenjak Jepang mulai menguasai Kamboja, nasionalisme Khmer telah tumbuh dan tidak menginginkan Kamboja kembali dikuasai oleh Perancis. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah Perancis pun berjanji akan memberikan otonomi pemerintahan khusus bagi Kamboja. Oleh karena desakan dan tekanan dari pihak Perancis, Sihanouk akhirnya menerima usulan Perancis dan membatalkan kemerdekaan Kamboja ketika pada masa Jepang.<sup>85</sup>

Sihanouk berpendapat bahwa akan lebih bijak dan realistis jika diadakan perundingan terlebih dahulu dengan pihak Perancis dalam hal pembatalan perjanjian negara protektorat pada tahun 1863 yang lalu.<sup>86</sup> Oleh sebab itu, Raja Sihanouk memutuskan untuk menerima tawaran otonomi Kamboja dari Perancis. Otonomi ini akan membuat Kamboja mempunyai pemerintahan sendiri dan berkuasa mengurus pemerintahan dalam negeri sendiri. Akan tetapi, seorang petugas Perancis akan ditempatkan di Kamboja sebagai penasihat politik yang

---

<sup>82</sup> Pada tahun 1939—1945, terjadi perang dunia II yang melibatkan Jepang, Jerman, dan Italia melawan sekutu, Amerika, Soviet, Inggris, Perancis. Jepang berupaya untuk menguasai seluruh Asia Tenggara di bawah pengaruhnya dengan tujuan untuk menyaingi kekuatan sekutu dan memenangkan perang.

<sup>83</sup> Kahin, *Op. Cit.*, hlm 343.

<sup>84</sup> Deviliers, *Op. Cit.*, hlm 51.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm 59.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm 60.

akan membantu tujuh menteri Kamboja dalam menjalankan tugas kerajaan.<sup>87</sup> Namun, otonomi tersebut diberikan hanya dalam rangka untuk tetap mengekalkan kekuasaan Perancis di Kamboja.

Perjanjian ini ditanggapi dingin oleh masyarakat Kamboja. Bahkan di selatan Kamboja, Khmer Issarak telah bersekutu dengan Vietnam untuk membebaskan Kamboja dari Perancis.<sup>88</sup> Untuk menyelesaikan konflik ini, Perancis memutuskan untuk mengizinkan Kamboja mempunyai Dewan Perhimpunan yang dipilih berdasarkan pemilu. Oleh karena itu, Perancis memperbolehkan Kamboja mendirikan partai-partai politik.<sup>89</sup> Kemudian pada 11 September 1946, diadakanlah pemilu pertama Kamboja untuk memilih Dewan Perhimpunan.<sup>90</sup> Pemilu ini dimenangkan oleh partai demokrat yang menduduki hampir sebagian besar kursi di Dewan Perhimpunan. Dengan pelantikan Dewan Perhimpunan yang dilaksanakan pada 6 Mei 1947, maka berakhirilah kekuasaan monarki absolut Kamboja dan digantikan dengan sistem monarki parlementer.<sup>91</sup>

Namun, sistem pemerintahan baru ini tidak berjalan dengan mulus karena dari tahun 1947—1952, politik Kamboja dipenuhi oleh konflik antara dewan perhimpunan dengan raja. Terlebih pada tahun 1949, ketika Sihanouk dan Yem Sambaur, perdana menteri Kamboja, menandatangani perjanjian dengan Perancis mengenai kemerdekaan Kamboja. Dewan Perhimpunan, melihat hal ini sebagai akal muslihat Perancis yang ingin mengekalkan kuasanya di Kamboja. Hal ini terlihat di beberapa butir perjanjian yang menandakan Perancis masih berhak

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 61.

<sup>88</sup> Khmer Issarak yang dalam bahasa Kamboja berarti gerakan pembebasan Kamboja merupakan organisasi bersenjata pertama Kamboja yang berjuang untuk memerdekakan Kamboja. Organisasi ini didirikan oleh Pach Chhoeun dan didukung oleh Son Ngoc tanh (Pelopor nasionalisme Kamboja). Setelah Pembubaran pemerintahan PM Son Ngoc Tanh pada masa pendudukan Jepang, Pach Chhoeun bersama dengan Khmer Issarak bekerjasama dengan Vietminh untuk mengusir Perancis dari Indocina. Sejak saat itu, Vietminh mulai memasuki dan beroperasi di Kamboja. Vickery, *Op.Cit.*, hlm.10

<sup>89</sup> Pada saat itu, tiga partai politik telah didirikan yaitu, **pertama** adalah partai Progresive Demokrat yang didirikan oleh Putera Norodom Montana. Partai ini mengusung sistem pemerintahan monarki konstitusional. **Kedua**, adalah Partai liberal yang didirikan oleh Putera Norodom Norinder, yang menginginkan revolusi Kamboja, tetapi masih berada dalam pengawasan Perancis. **Ketiga** adalah partai demokrat yang didirikan oleh Putera Sisowath Youtevong. Partai ini menginginkan kemerdekaan penuh bagi Kamboja. Lihat Kahin, *Op.Cit.*, hlm 794.

<sup>90</sup> Devillers, *Op.Cit.*, hlm 66.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm 67.

berkuasa di Kamboja.<sup>92</sup> Dalam beberapa tahun berikutnya, pergerakan-pergerakan nasionalis yang menginginkan Kamboja merdeka mulai timbul di masyarakat Kamboja. Sejak saat itu, banyak demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan masyarakat untuk menentang Perancis di Kamboja.

Melihat hal ini, Sihanouk tidak ada pilihan lain untuk mendukung nasionalisme Khmer dan memperjuangkan kemerdekaan Kamboja.<sup>93</sup> Untuk merealisasikan hal tersebut, pada Januari 1953 Sihanouk mengirimkan surat kepada Vincet Auriol, presiden Perancis, yang berisikan penuntutan kemerdekaan Kamboja.<sup>94</sup> Usaha Sihanouk memperjuangkan kemerdekaan, ia sebut sebagai peperangan salib untuk kemerdekaan (*Crusade for Independence*).<sup>95</sup> Untuk melaksanakan niatnya, ia pun pergi ke Perancis untuk memberikan memorandum kemerdekaan Kamboja ke Auriol. Setelah itu, ia pergi ke Ottawa dan New York untuk mencari dukungan internasional kemerdekaan Kamboja. Namun, saat itu usahanya tidak membuahkan hasil dan ia memutuskan untuk pulang ke Phnom Penh pada Juni 1953. Di Phnom Penh, ia mengumumkan bahwa dirinya akan ke Bangkok lalu ke Battambang untuk mengasingkan diri secara sukarela. Selain itu, ia juga bersumpah tidak akan kembali ke istananya sebelum Kamboja merdeka.<sup>96</sup>

Krisis di Kamboja, tekanan militer yang dilakukan Pathet Lao (Laos), dan perjuangan komunis di Vietnam telah membuat Perancis sadar bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengamodasi nasionalisme negara-negara Indocina. Akhirnya pada 3 Juli 1953, perdana menteri Perancis, Joseph Laniel menyatakan bahwa Perancis sudah menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Kamboja.<sup>97</sup> Sihanouk pun menanggapi pernyataan tersebut dengan menuntut kemerdekaan penuh bagi Kamboja. Akhirnya pada 9 November 1953, Kamboja pun diberikan kemerdekaan dari pihak Perancis.<sup>98</sup>

Walaupun Kamboja sudah mendapatkan kemerdekaan pada akhir tahun 1953, namun situasi militer di Kamboja masih belum stabil. Khmer Issarak yang

<sup>92</sup> Untuk lebih jelasnya melihat butir-butir perjanjian antara Sihanouk dengan Perancis pada tahun 1949. Lihat *Ibid.*, hlm 72.

<sup>93</sup> Kahin, *Op.Cit.*, hlm 800.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Stainberg., *Op.Cit.*, hlm 511.

<sup>96</sup> Kahin, *Op.Cit.*, hlm 800.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Milton Osborne, *Op.Cit.*, hlm 81.

telah bergabung dengan Vietminh<sup>99</sup> dari tahun 1945 guna melepaskan Indocina dari cengkraman Perancis, ternyata membuat permasalahan keamanan Kamboja lebih berbahaya. Sejak saat itu, pergerakan Vietminh di selatan Kamboja semakin meluas sehingga tidak jarang mereka memasuki daerah teritori Kamboja.

Untuk mengatasi masalah Vietminh dan kemanan Indocina pada umumnya, diadakanlah perundingan Jenewa pada Mei—Juli 1954. Perundingan Jenewa ini dihadiri oleh Kamboja, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, RRC, Uni Soviet, Perancis, Inggris, dan Amerika.<sup>100</sup> Tujuan dari perundingan ini adalah untuk menciptakan kedamaian dan kestabilan di Indocina. Perundingan tersebut menghasilkan ketetapan yang menyatakan bahwa semua pasukan militer Vietminh dan Perancis harus meninggalkan tanah Kamboja. Sebagai imbalan penarikan semua pasukan Vietnam dari Kamboja, pihak komunis dalam perundingan ini meminta Kamboja untuk menjaga kenetralannya. Sejak perundingan Jenewa yang selesai pada Juli 1954, Kamboja merdeka dari segala kekuatan asing dan bersikap netral terhadap dua kekuatan dunia saat itu.

### 2.3 Kamboja Merdeka (1953—1970)

Setelah kemerdekaan Kamboja diratifikasi melalui Perundingan Jenewa pada tahun 1954, Pangeran Norodom Sihanouk menjadi pemimpin pertama negeri ini. Semenjak Pangeran Norodom Sihanouk menjadi pemimpin, ia memperkenalkan sebuah organisasi demokrasi yang disebut Sangkum, yaitu, *Sangkum Reastyr Niyum*, pada Maret 1955.<sup>101</sup>

Sihanouk berharap dengan adanya partai Sangkum, rakyat Kamboja dapat memahami arti demokrasi yang sesungguhnya, yakni demokrasi yang memberi peluang bagi rakyat untuk ambil bagian dalam proses pemerintahan Kamboja. Selain itu, ia juga berharap dengan adanya Sangkum dapat menghilangkan jarak

<sup>99</sup> Vietminh adalah kata yang mempunyai arti “Liga Pembebasan Vietnam”. Vietminh adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Ho Chi Minh sebagai taktik dalam menghadapi fasis Jepang. Sebagai suatu ideologi, paham komunis dan fasis mempunyai perbedaan yang sangat tajam dalam hal sistem pengaturan kenegaraannya. Vietminh sendiri berasal dari partai komunis Vietnam. Pergerakan Vietminh masih tetap ada hingga perundingan Jenewa, 1954.

<sup>100</sup> Kahin, *Op.Cit.*, hlm 801

<sup>101</sup> Sangkum didefinisikan sebagai organisasi kebangsaan Kamboja yang menentang ketidakadilan, penekanan, dan pengkhianatan terhadap rakyat dan negara Kamboja. Sangkum dipimpin sendiri oleh Sihanouk dan didukung oleh sebagian besar rakyat dan kalangan bangsawan. Lihat Devillers, *Op.Cit.*, hlm 81.

antara pemimpin Kamboja dengan rakyat. Namun, dengan adanya Sangkum, Pangeran Norodom justru menjadi penguasa tunggal Kamboja yang bersikap otoriter. Hal ini dibuktikan dengan sikapnya yang represif terhadap elemen oposisi yang menentangnya. Sangkum mendominasi perpolitikan dan pemerintahan Kamboja dari tahun 1955—1970.

Sementara itu, perang antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat atau lebih dikenal dengan Perang Indochina II (1960—1975), ternyata telah melibatkan Kamboja dalam pertempuran tersebut secara tidak langsung. Dengan semakin tinggi intensitas perang ini, telah membuat banyak pasukan komunis Vietnam utara dan Vietkong<sup>102</sup> memasuki wilayah-wilayah Kamboja bagian timur yang berbatasan dengan Vietnam untuk dijadikan basis pertahanan dan basis logistik Vietkong. Hal ini tentu saja menjadikan keamanan dan integritas teritorial Kamboja menjadi terganggu. Dalam hal ini, Pangeran Norodom Sihanouk membiarkan hal ini terjadi di daerah-daerah pedesaan Kamboja karena sikapnya yang ambigu terhadap politik luar negerinya yang netral. Pada saat itu Sihanouk beralih Amerika akan segera meninggalkan Indocina karena kalah dan Vietnam Utara akan mencapai kemenangan. Oleh karena itu, Sihanouk beranggapan adalah lebih baik bersahabat dengan komunis daripada memusuhinya.

Pada tahun 1970, Situasi ekonomi Kamboja semakin buruk dan diperparah dengan infiltrasi militer Vietnam Utara dan Vietkong, telah membuat Perdana Menteri Lon Nol berniat menggulingkan Pangeran Norodom Sihanouk. Hal ini terjadi ketika Sihanouk melakukan lawatan ke luar negeri. Pada 18 Maret 1970, diadakanlah sidang mendadak Majelis Nasional Kamboja untuk membicarakan masalah negara yang berada dalam bahaya.<sup>103</sup> Dalam sidang tersebut, semua anggota majelis memutuskan secara bulat untuk memecat Pangeran Norodom Sihanouk sebagai kepala negara.<sup>104</sup>

Naiknya Lon Nol menjadi pemimpin Kamboja telah mengubah sistem pemerintahan Kamboja dari monarki konstitusional menjadi Republik Khmer.

---

<sup>102</sup> Pergerakan komunis yang lahir di Vietnam Selatan, yang menolak adanya Amerika di Vietnam pada perang Indochina II. Vietkong adalah sebutan orang-orang barat terhadap orang-orang komunis di Vietnam Selatan.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm 119.

<sup>104</sup> Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm.43.

Guna mengantisipasi kudeta Lon Nol, Pangeran Norodom Sihanouk membuat koalisi perjuangan dengan *Communist Party of Kampuchea-CPK*.<sup>105</sup> Sikap Lon Nol yang cenderung berkiblat ke Amerika dan anti-komunis telah menimbulkan perlawanan dari CPK untuk menentang kekuasaan asing di Kamboja. Sikap antipati Sihanouk dan CPK terhadap pemerintahan Lon Nol dan kekuatan asing merupakan salah satu landasan perjuangan yang menyatukan mereka.

Oleh sebab itu, pada 5 Mei 1970, Sihanouk mendirikan *Front uni National Du Kampuchea* (FUNK)<sup>106</sup> dan *Gouvernement Royal d'Union National du Kampuchea* (GRUNK).<sup>107</sup> Norodom Sihanouk menjabat sebagai kepala negara GRUNK, Penn Nouth sebagai perdana menteri, dan Khieu Samphan sebagai wakil perdana menteri, menteri pertahanan, serta kepala komandan angkatan bersenjata.<sup>108</sup> Namun, perbedaan pemikiran di antara mereka, menimbulkan masalah dalam tubuh FUNK. Sihanouk yang berpandangan feodalis dan tradisional tidak disukai CPK, yang anti-monarki. Hal ini membuat CPK bergerak sendiri tanpa melibatkan Sihanouk dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Lon Nol.

Akhirnya, pada 17 April 1975, Phnom Penh berhasil dikuasai oleh CPK dari tangan pemerintahan Lon Nol.<sup>109</sup> Dengan jatuhnya ibukota Kamboja ke tangan CPK, berakhirilah kekuasaan Lon Nol sebagai pemimpin Republik.

#### **2.4 Kamboja di bawah Pemerintahan Khmer Merah (1975—1979)**

Setelah mendengar Kamboja dikuasai oleh CPK, Sihanouk pun berniat kembali ke Kamboja karena menganggap dirinya telah berhasil memenangkan perjuangan melawan Lon Nol. Ia pun kembali ke Phnom Penh pada 31 Desember

<sup>105</sup> *Communist Party of Kampuchea* dipimpin oleh Pol Pot, Khieu Samphan, Leng Sary, dan Huo Yuon. Pada awalnya CPK adalah sebuah partai politik yang bernama *Khmer People's Revolutionary Party* yang dibentuk pada September 1951. Namun dalam perkembangannya, partai ini kemudian dikenal dengan CPK. Untuk lebih jelasnya lihat Ben Kiernan. "Origins of Khmer Communism." dalam *Southeast Asian Affairs 1981*. Pasir Panjang: ISEAS. hlm. 161-169.

<sup>106</sup> Tujuan didirikannya FUNK atau Barisan Kebangsaan Bersatu Kamboja adalah untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kamboja serta mempertahankan kerajaan Kamboja. Kerajaan ini didirikan di Peking dan mendapat dukungan penuh dari Cina. Lihat Devillers, *Op.Cit.*, hlm 120

<sup>107</sup> Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 43.

<sup>108</sup> Michael Vickery, *Op.Cit.*, hlm.26.

<sup>109</sup> David Chandler. *A History of Cambodia, Second Edition*. Colorado: Westview Press Inc.1996. hlm 208.

1975.<sup>110</sup> Setelah itu, CPK pun memproklamasikan pemerintahannya dengan nama *Democratic Kampuchea* pada tanggal 5 Januari 1976.<sup>111</sup> Tiga bulan setelah pengumuman pemerintahan baru tersebut, Sihanouk mengundurkan diri sebagai kepala negara Kamboja pada 2 April 1976.<sup>112</sup>

Pengunduran diri Sihanouk dari pemerintahan Kamboja kemungkinan disebabkan desakan dari Khmer Merah yang menginginkan Sihanouk pensiun dari perpolitikan Kamboja karena Khmer Merah ingin berkuasa sepenuhnya di Kamboja. Sehingga penerapan revolusi komunis di Kamboja dapat dilaksanakan seutuhnya. Sejak pengunduran diri Sihanouk dari arena politik Kamboja, ia beserta keluarganya dikenakan tahanan rumah. Sihanouk pun tidak tampil dalam kepemimpinan Kamboja selama masa kekuasaan Khmer Merah. Ia baru tampil kembali dalam panggung politik setelah Kamboja di invasi oleh Vietnam.

Dengan naiknya Pol Pot, pimpinan Partai Komunis Kamboja yang lebih dikenal dengan Khmer Merah (seterusnya Khmer Merah)<sup>113</sup> sebagai penguasa Kamboja, Kamboja mengalami revolusi radikal yang belum terjadi dalam sejarah Kamboja. Untuk mengatur dan mengontrol sistem pemerintahan secara sistematis, Khmer Merah pun membagi Kamboja ke dalam tujuh zona, yaitu zona timur laut, zona barat, zona barat daya, zona utara, zona pusat, dan zona timur yang terus dipertahankan hingga tahun 1978.<sup>114</sup> Para pemimpin di setiap zona mempunyai otonomi dan otoritas serta peraturan sendiri dalam menjalani revolusi Kamboja berdasarkan latar belakang dan kecenderungan mereka.<sup>115</sup>

Sebagai contoh di zona timur, para pemimpinnya lebih pro kepada komunis Vietnam karena berdasarkan revolusi kemerdekaan terdahulu, mereka pernah bergabung dengan Vietminh pada masa kekuasaan kolonial Perancis.

<sup>110</sup> Milton Osborne, *Op.Cit.*, hlm 231.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm 228-243.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Sebutan Khmer Merah-Khmer Rouge ini diberikan oleh Sihanouk kepada organisasi komunis ini (CPK). Hal ini disebabkan, Sihanouk mempunyai tiga kategori jenis Khmer. **Pertama**, "Khmer Blancs", Sihanouk menyatakan dirinya dan pengikutnya sebagai Khmer putih karena Khmer ini adalah nasionalis, independen, netral, dan Buddhist. **Kedua**, "Khmer Bleus". Khmer ini adalah Lon Nol yang pro-Amerika, reaksioner, pro-kapitalis, dan pro-dunia bebas. **Ketiga**, "Khmer Rouge"-Khmer Merah. Khmer ini adalah komunis dan kiri. Lihat Peter Schier Manola Schier-Oum In Colaboration with Waldtraut Jarke. *Prince Sihanouk On Cambodia : Interviews and Talks With Prince Norodom Sihanouk*. Hamburg: Mitteilungen des Instituts Fur Asienkunde. 1985. hlm 7.

<sup>114</sup> David Chandler, *Op.Cit.*, hlm 212.

<sup>115</sup> Vikery, *Op.Cit.*, hlm 35.

Selain itu, mereka juga ikut dalam perang Indocina II, yang melibatkan Vietnam dan Amerika. Sedangkan di zona selatan dan barat, para pemimpinnya didominasi oleh orang-orang yang anti Vietnam dan lebih pro kepada komunis China seperti Pol Pot.<sup>116</sup>

Dalam hal hubungannya dengan Vietnam, negara tetangganya, pemerintahan Khmer Merah ini cenderung bersikap memerangi pemerintahan Vietnam. Hal ini dibuktikan, pada 1 Mei 1975, pasukan Khmer Merah langsung menyerang daerah-daerah Vietnam yang berbatasan dengan Kamboja, yaitu dari daerah Ha Tien sampai Tay Ninh.<sup>117</sup> Kemudian pada 4 dan 10 Mei 1975 pasukan Khmer Merah juga menduduki wilayah Pulau Phu Quoc dan Pulau Tho Chu, wilayah Vietnam.<sup>118</sup> Di dalam penyerangan tersebut, para pemimpin faksi Khmer Merah juga telah menginstruksikan pasukannya untuk membunuh para penduduk sipil yang berada di daerah perbatasan.<sup>119</sup>

Penyerangan-penyerangan pasukan Khmer Merah ke berbagai wilayah perbatasan Vietnam—Kamboja maupun wilayah Vietnam sendiri dipicu oleh faktor sejarah. Hal ini disebabkan pemerintahan *Democratic Kampuchea* (DK) menginginkan kembalinya wilayah Kamboja yang telah dikusai oleh Vietnam selama dua abad silam.<sup>120</sup> Masalah ini menjadi krusial karena daerah perbatasan Vietnam—Kamboja ditentukan oleh pemerintah kolonial Perancis yang telah disepakati kedua negara pada Perundingan Jenewa 1954. Selain itu, Kamboja dan Vietnam pun setuju mengenai garis Brevile yang ditentukan oleh Perancis pada tahun 1939, yang merupakan garis perbatasan diantara kedua negara, dari teluk

<sup>116</sup> Vikery, *Op. Cit.*, hlm 30.

<sup>117</sup> Hoang Nguyen. *The Vietnam-Kampuchea Conflict (A Historical Record)*. Hanoi: Foreign Language Publishing House. 1979. hlm.19

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm 21.

<sup>120</sup> Antara tahun 1870 dan 1914, pemerintah kolonial Perancis telah menentukan kembali batas-batas wilayah antara Vietnam dan Kamboja, dan ternyata pemerintahan kolonial Perancis memasukkan sebagian wilayah Kamboja menjadi sebagian wilayah administratif Vietnam seperti daerah propinsi Vietnam, Tay Ninh yang kebanyakan populasi penduduknya adalah masyarakat Kamboja. Kemudian pada 5 Juni 1948 melalui perjanjian *Along Bay*, Perancis secara resmi mengakui koloni mereka yaitu Cochinchina, yang daerahnya adalah sebagian wilayah selatan Kamboja dan dijadikan bagian negara Vietnam. Masyarakat Kamboja menyebut wilayah Kamboja yang dimasukkan ke dalam wilayah Vietnam sebagai Kamboja Krom. Lihat Stephen J. Morris. *Why Vietnam Invaded Cambodia?*. California: Stanford University Press. 1999. hlm 91.

Siam hingga pulau Phu Quoc yang dimiliki Vietnam.<sup>121</sup> Namun, ternyata masalah perbatasan ini mencuat kembali pada tahun 1960 dan mencapai puncaknya pada rezim Khmer Merah.<sup>122</sup>

Penyerangan-penyerangan Kamboja (Khmer Merah) ke Vietnam, telah membuat pemerintahan kedua negara mengalami ketegangan. Untuk mengatasi masalah ini, pada Juni 1975 hingga tahun 1976, kedua pemerintahan (Vietnam dan Kamboja) bertemu dalam beberapa perundingan untuk mendiskusikan masalah perbatasan Kamboja—Vietnam. Namun, perundingan damai ini tidak berjalan dengan baik, bahkan pada April 1977 Khmer Merah kembali menyerang daerah-daerah perbatasan Vietnam—Kamboja.<sup>123</sup> Akibat ketegangan yang semakin meningkat dan pembicaraan damai yang tidak berujung penyelesaian, maka pada akhir tahun 1977 pemerintahan DK memutuskan hubungan diplomatik dengan Vietnam.<sup>124</sup>

Pemutusan hubungan diplomatik dengan Vietnam juga disebabkan faktor kecurigaan Pol Pot terhadap niat Vietnam atas Kamboja. Pol Pot melihat sikap Vietnam yang ingin menguasai dan mengontrol Kamboja dan Indocina, pada khususnya seperti yang pernah dilakukan Perancis dulu. Vietnam ingin merealisasikan impian Ho Chi Minh ketika mendirikan *Indochinese Communist Party* (ICP) pada tahun 1930—untuk mendirikan federasi Indocina. Pol Pot melihat Vietnam ingin mengepung Kamboja dan menguasai Kamboja, setelah Vietnam dan Laos menandatangani pakta persahabatan dan kerjasama yang pada intinya menempatkan Laos di bawah bayang-bayang Vietnam.<sup>125</sup>

Dengan adanya serangan pasukan Khmer Merah ini, Kamboja dianggap telah membahayakan pemerintahan Vietnam. Karena bertindak menyerang

<sup>121</sup> David W. P. Elliot (ed.). *The Third Indochina Conflict*. Colorado: Westview Press Inc. 1981. hlm. 22.

<sup>122</sup> Pada tahun 1966, diadakan perundingan-perundingan mengenai perbatasan antara pemerintahan Kamboja yang saat itu dipegang oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan pemerintah Vietnam. Sebagai hasil perundingan tersebut, Vietnam akhirnya bersedia mengakui bahwa pulau-pulau di sebelah utara garis Brevie adalah masuk kawasan Kamboja. Namun pada tahun 1970, Vietnam mengumumkan versinya sendiri mengenai perbatasan tersebut, yang sangat berlainan dengan kesepakatan tahun 1966. Hal ini dikarenakan, saat itu Vietnam belum menyadari bahwa perbatasan tersebut menyangkut landasan kontingen dan masalah perairan territorial. Oleh sebab itu, pada Mei 1976 Vietnam memutuskan untuk mengubah sikap mereka untuk tidak mengakui garis Brevie yang telah disepakati sebelumnya.

<sup>123</sup> Nguyen, *Op.Cit.*, hlm 21.

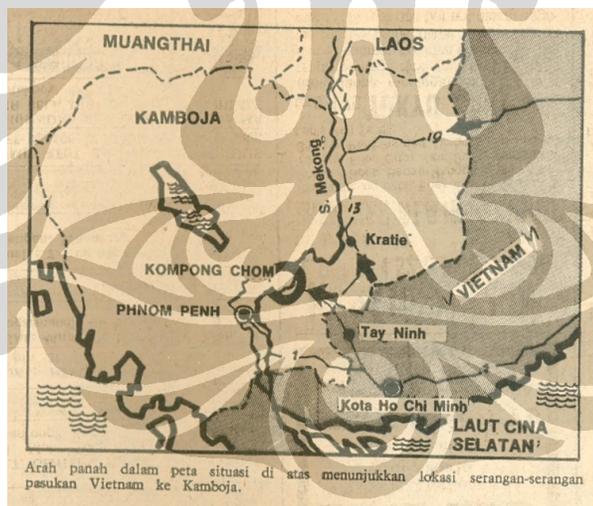
<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm 23.

<sup>125</sup> Chandler, *Op.Cit.*, hlm 220

daerah-daerah Vietnam, yang secara langsung berdampak dan menimbulkan pergolakan di daerah sepanjang perbatasan Vietnam—Kamboja dan tentunya mengganggu keamanan nasional Vietnam. Oleh karena itu, pada tahun 1978 Vietnam berniat untuk menggulingkan rezim Pol Pot, yang didukung oleh China dengan kekuatan militer.<sup>126</sup>

## 2.5 Invasi Vietnam Atas Kamboja

Serangan yang dilakukan Khmer Merah terhadap wilayah-wilayah Vietnam telah menimbulkan reaksi keras dari Vietnam. Reaksi keras tersebut berupa serangan militer ke Kamboja. Akhirnya, pada 25 Desember 1978, Pemerintahan Sosialis Vietnam menyerang Kamboja dengan kekuatan militer yang ofensif dengan menggunakan 30 divisi artileri dan 150.000 pasukan Vietnam.<sup>127</sup> Serangan ke Kamboja didahului dengan berbagai pengeboman dari pesawat angkatan udara Vietnam ke jalan-jalan yang masuk dan keluar Phnom Penh.<sup>128</sup> Sejak natal sekitar 40 pesawat MIG-21, menyerang sembilan propinsi di timur laut Kamboja.<sup>129</sup>



(Kompas, 6 Januari 1979. "RRC Himbau PBB Dukung Kamboja".)

<sup>126</sup> Morris, *Op.Cit.*, hlm 107-111.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>128</sup> Kompas, 3 Januari 1979. "Kamboja Minta Bantuan Internasional Hadapi Serangan Vietnam"

<sup>129</sup> *Ibid.*

Serangan Vietnam ke Kamboja dibantu oleh 20.000 pemberontak Kamboja.<sup>130</sup> Mereka adalah mantan anggota Khmer Merah di wilayah timur Kamboja yang kecewa terhadap pemerintahan Pol Pot dan akhirnya memutuskan untuk menentang dan menumbangkan rezim Pol Pot dengan bantuan Vietnam. Mereka ini tergabung dalam *National Union Front the Salvation of Kampuchea* (NUFSK) 'Front Persatuan Nasional Penyelamatan Kampuchea' yang bertujuan membawa Kamboja dalam kemerdekaan yang sesungguhnya dan lepas dari pemerintahan teror Pol Pot.<sup>131</sup> Pemimpin dari kelompok ini adalah Heng Samrin, yakni mantan anggota komite eksekutif Partai Komunis Kamboja untuk wilayah timur dan mantan komisaris politik serta komando divisi IV.<sup>132</sup>

Hal ini disebabkan oleh pembagian struktur pemerintahan Khmer Merah yang terbagi dalam tujuh zona sehingga membuat keretakan dalam tubuh Khmer Merah. Ini dipicu karena setiap zona mempunyai otonomi masing-masing untuk menjalankan revolusi Kamboja dalam membangun masyarakat komunis Kamboja. Ternyata penerapan revolusi Kamboja antara zona barat, yang dipimpin oleh Pol Pot dengan zona timur, yang dipimpin Heng Samrin berbeda. Sebagai contoh, penerapan revolusi Pol Pot lebih keras dan membunuh siapa pun yang bertentangan dengan cita-cita komunis.<sup>133</sup>

Sedangkan, di zona timur, penerapan revolusi komunisnya lebih lunak. Sikap dari pemimpin zona timur ini tidak disukai oleh Pol Pot, yang dinilainya bertentangan dengan revolusi komunisnya. Akhirnya, Pol Pot melakukan usaha pembunuhan para pemimpin zona timur. Namun, Heng Samrin dan Pen Sovan selamat dan melarikan diri ke Vietnam. Perlu diingat bahwa para pemimpin zona timur ini pernah bergabung dengan Vietminh pada masa perjuangan kemerdekaan sehingga pemimpin zona timur ini mempunyai hubungan yang spesial dengan Vietnam.

Invasi Vietnam yang bertujuan untuk menjatuhkan Khmer Merah menggunakan ratusan ribu personil pasukan Vietnam dan orang-orang Kamboja

---

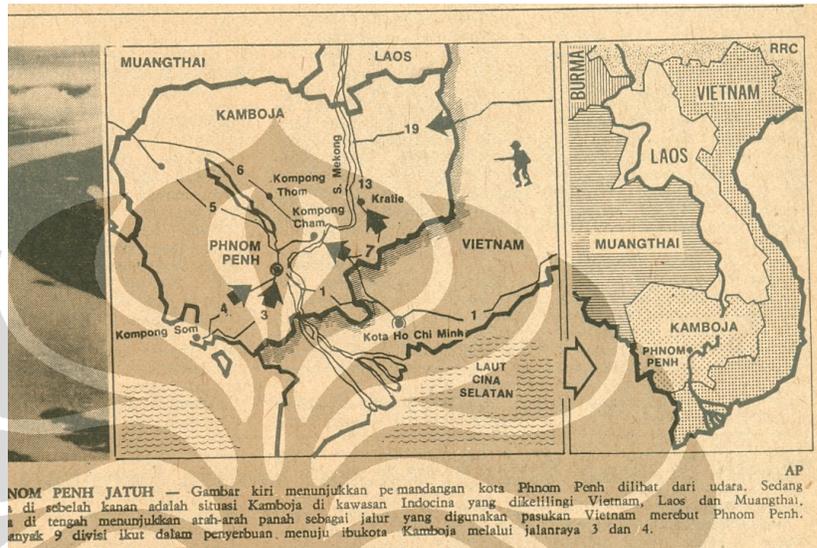
<sup>130</sup> *Kompas*, 4 Januari 1979. "Pemberontak Kamboja Mengepung Kompong Cham-Kamboja Serukan Perang Rakyat."

<sup>131</sup> Nguyen, *Op.Cit.*, hlm 34.

<sup>132</sup> Muchtar E. Harahap dan M.Arbiyanto. *Konflik Damai Kampuchea*. Jakarta: NSEAS dan FOGMA. 1990. hlm. 12.

<sup>133</sup> Untuk lebih jelasnya lihat Vikery, *Op.Cit.*, hlm 35.

yang pro-Vietnam telah memaksa Khmer Merah melakukan perlawanan balik. Setelah pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan Vietnam dengan pasukan militer Khmer Merah, Phnom Penh, ibu kota Kamboja, jatuh dan dapat dikuasai oleh pasukan Vietnam pada tanggal 7 Januari 1979.<sup>134</sup>



PHNOM PENH JATUH — Gambar kiri menunjukkan pemandangan kota Phnom Penh dilihat dari udara. Sedangkan gambar di sebelah kanan adalah situasi Kamboja di kawasan Indocina yang dikelilingi Vietnam, Laos dan Muangthai. Panah di tengah menunjukkan arah-arah panah sebagai jalur yang digunakan pasukan Vietnam merebut Phnom Penh. Divisi 9 ikut dalam penyerbuan menuju ibukota Kamboja melalui jalanraya 3 dan 4.

(Kompas, Selasa 9 Januari 1979. “Dengan jatuhnya Kamboja, Asia Tenggara dalam bahaya.”)

Sehari setelah Phnom Penh Jatuh, kelompok anti Khmer Merah yang tergabung dalam NUFSK membentuk *Kampuchean People's Revolutionary Council* (KPRC) ‘Dewan Revolusi Rakyat’ yang merupakan embrio dari pemerintahan Kamboja selanjutnya.<sup>135</sup> Kemudian pada 12 Januari 1979, kelompok yang pro-Vietnam, Heng Samrin, mendirikan pemerintahan yang disebut *People's Republic of Kampuchea* (PRK) ‘Republik Rakyat Kamboja’, yang menggantikan pemerintahan Khmer Merah di Kamboja.<sup>136</sup>

Invasi Vietnam ke Kamboja telah mengundang perhatian dunia internasional. Sebagian besar negara mengkritik tindakan Vietnam yang telah melakukan intervensi dalam pergantian tampuk pemerintahan dan menancapkan kuku kekuasaannya di Kamboja. Hal ini seharusnya tidak terjadi mengingat Kamboja adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Reaksi-reaksi dan kritikan keras pun dilontarkan ke arah Vietnam karena telah berani menginvasi

<sup>134</sup> Justus M. Der Kroef. “Cambodia : From Democratic Kampuchea” to “People’s Republic”. *Asian Survey*, Volume XIX, No 8, August 1979. California : University of California. hlm 733.

<sup>135</sup> *Ibid.*, 731

<sup>136</sup> Vikery, *Op.Cit.*, hlm 43.

Kamboja. Salah satunya adalah kritikan tajam yang disampaikan ASEAN.<sup>137</sup> Kritikan ASEAN terlihat dari pernyataan bersama ASEAN, se usai pertemuan para menlu ASEAN yang menyatakan: “*ASEAN menyesalkan intervensi bersenjata Vietnam di Kamboja terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Kamboja serta menegaskan hak rakyat Kamboja untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan kekuatan luar, dan menyerukan ditariknya segera semua pasukan asing dari Kamboja.*”<sup>138</sup> ASEAN khawatir konflik ini akan berlangsung lama dan secara tidak langsung dapat mengganggu keamanan regional dan stabilitas politik Asia Tenggara.

Selain itu, reaksi keras juga berasal dari Cina, yang merupakan negara pendukung rezim Pol Pot. Cina menganggap bahwa serangan Vietnam telah melanggar hak politik rakyat Kamboja karena telah mencampuri urusan dalam negeri Kamboja. Cina pun menganggap invasi Vietnam yang didukung oleh Uni Soviet atas Kamboja sebagai strategi pengepungan terhadap negaranya. Cina menganggap Uni Soviet berusaha mengepungnya dari selatan dengan cara menempatkan wilayah Indocina sebagai daerah pengaruhnya.

Amerika Serikat juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah konflik Kamboja ini. Hal tersebut diperlihatkannya dengan cara tidak mengakui pemerintahan Kamboja yang dipegang oleh Heng Samrin. Selain itu, Amerika juga melakukan kebijakan isolasi politik serta ekonomi terhadap Vietnam dan pemerintahan Heng Samrin, sebagai realisasi dari kebijakan *Containment*.<sup>139</sup> Jepang pun mengutuk invasi yang dilakukan Vietnam terhadap Kamboja. Pemerintah Jepang menyerukan penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja dengan segera. Pada tingkat internasional pun, Jepang memberikan dukungan terhadap usaha untuk mempertahankan kursi DK di PBB.<sup>140</sup>

Namun, dalam hal ini, Uni Soviet dan negara-negara blok timur mendukung invasi Vietnam dan mengakui rezim Heng Samrin. Akan tetapi,

<sup>137</sup> ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) merupakan wadah politik regional negara-negara Asia Tenggara didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina yang telah menandatangani Deklarasi Bangkok.

<sup>138</sup> Hal ini terlihat dalam 5 pasal pernyataan bersama ASEAN setelah pertemuan para menlu ASEAN pada 13 Januari 1979. Untuk lebih jelasnya lihat *Kompas*, 15 Januari 1979. “ASEAN Siap Ambil Langkah Apapun”

<sup>139</sup> Russel, *Op.Cit.*, hlm.99.

<sup>140</sup> Roger Kershaw. *Multipolarity and Cambodia Crisis of Survival a Preliminary Perspective on 1979*. Dalam *Southeast Asian Affairs: Pasir Panjang*: ISEAS. 1980. 169-170.

kecuali Rumania yang tidak menyatakan dukungan terhadap rezim Heng Samrin dan tidak pula terlihat mengancam pemerintahan baru Kamboja. Rumania hanya menyatakan konflik Kamboja merusak keinginan damai dan merdeka rakyat Kamboja.<sup>141</sup>

Konflik Kamboja ini pun semakin rumit dan terganggu ketika pada 17 Februari 1979 China menyerang Vietnam.<sup>142</sup> China melancarkan serangan besar-besaran ke dalam wilayah Vietnam dari 14 jurusan di sepanjang perbatasannya dengan Vietnam, dari Lai Chau di sebelah barat—Quang Ninh di sebelah timur.<sup>143</sup> Serangan ini dimaksudkan China untuk memerangi Vietnam sebagai hukuman atas perbuatan keras Vietnam yang telah melakukan provokasi-provokasi bersenjata di daerah perbatasan China selama tahun 1978—1979.<sup>144</sup>

Tindakan ini dilakukan China supaya Vietnam mendapat pelajaran karena selama ini Vietnam telah banyak mengganggu daerah perbatasan China. Sikap pemerintah China ini dapat dilihat dari pengumuman yang disiarkan oleh *Xinhua*<sup>145</sup>, yang mengatakan bahwa “ Kami tidak menginginkan sejengkal tanah Vietnam, yang kami inginkan hanyalah keadaan perbatasan yang damai dan tenteram tanpa ada provokasi bersenjata.”<sup>146</sup>

Namun, banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa serangan China ke Vietnam dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada Vietnam karena telah berani melakukan intervensi dan invasi ke Kamboja. Alasan ini agaknya benar karena salah satu syarat yang diberikan oleh pemerintah China dalam upaya penarikan mundur seluruh pasukan China dari wilayah Vietnam adalah penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja.<sup>147</sup> Penyerangan China ke Vietnam juga memperlihatkan ketidaksukaan China atas federasi Indochina yang menempatkan Laos dan Kamboja di bawah *proteksi* Vietnam, yang di bawah bayang-bayang Uni Soviet.

<sup>141</sup> *Kompas*, 11 Januari 1979. “ Konflik Kamboja Bisa Menjurus Ke Arah Perang Antara RRC—US.”

<sup>142</sup> *Kompas*, 18 Februari 1979. “Cina Serang Vietnam.”

<sup>143</sup> Oct, Ovy Ndouk. “Penyerbuan RRC ke Vietnam: Suatu Pelajaran”. dalam *Analisa*. Jakarta: CSIS. Tahun X. 1981.

<sup>144</sup> Untuk lebih jelasnya lihat, *ibid*.

<sup>145</sup> Kantor berita resmi China.

<sup>146</sup> *Kompas*, 6 Maret 1979. “Pasukan RRC akan Ditarik Mundur.”

<sup>147</sup> *Kompas*, 2 Maret 1979. “Uni Soviet Mungkin akan Kirim Pasukan Sukarela ke Kamboja.”

Sementara pemerintah China menyerang Vietnam, pada saat itulah Vietnam telah melakukan pendekatan -pendekatan melalui PM, Vietnam Pham Van Dong, dengan Pemerintahan Heng Samrin untuk menjalin persahabatan kedua negara lebih erat. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan pakta perdamaian, persahabatan, dan kerjasama kedua negara pada 18 Februari 1979 di Phnom Penh.<sup>148</sup> Penandatanganan pakta serupa juga pernah dilakukan oleh Vietnam dengan pemerintahan Laos pada Juli 1977.<sup>149</sup> Pakta perdamaian, persahabatan, dan kerjasama antara Vietnam dan Kamboja meliputi aspek pertahanan, ekonomi, kebudayaan, dan masalah perbatasan.

Pakta ini berisi 6 pasal.<sup>150</sup> Salah satu berisikan mengenai prinsip bahwa pertahanan nasional bersama sejalan dengan keinginan kedua rakyat, Vietnam dan Kamboja. Selain itu, kedua pihak juga dengan segenap hati memberi dukungan dan memberi bantuan satu dengan yang lain di segala bidang.<sup>151</sup> Pasal-pasal ini juga menyatakan bahwa pakta ini menilai penting solidaritas militan dan kesetiakawanan yang telah menjadi tradisi antara Kamboja, Laos, dan Vietnam dan jika perlu dalam bentuk apa saja untuk memperkuat kemampuan mempertahankan negara masing-masing.<sup>152</sup>

Pasal-pasal ini jelas memperlihatkan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan tindakan efektif saling membantu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, integritas teritorial terhadap kekuatan-kekuatan internasional yang mungkin memusuhi mereka. Bila diamati, pasal-pasal dalam pakta tersebut memberikan Vietnam dasar hukum bagi kehadiran pasukan militernya di Kamboja maupun Laos. Dengan pakta ini juga maka terwujudlah cita-cita Ho Chi Minh pada tahun 1930, yaitu federasi Indochina.

---

<sup>148</sup> *Kompas*, 20 Februari 1979. "Pakta Vietnam-Kamboja."

<sup>149</sup> *Kompas*, 17 Februari 1979. "Kamboja dan Vietnam akan Tandatangani Pakta Persahabatan."

<sup>150</sup> *Kompas, Loc.Cit.*, "Pakta Vietnam-Kamboja."

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*